

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 8 Tahun 2011.*

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014.*

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 8 Tahun 2015.*

_____. *Undang-Undang tentang Pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017.*

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perppu Nomor 2 Tahun 2020.*

_____. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK Nomor 5 Tahun 2020.*

B. **Buku**

Ashiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

_____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni, 2009.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2013.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

C. **Lain-Lain**

Arfana, Nano Tresna. "Wakil Ketua MK Ulas Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sekolah Pemilu". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16650&menu=2>. Diakses tanggal 10 Maret 2021.

Chakim, M. Lutfi. "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 3 No. 1 (2014).

Hasanah, Sovia. "Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Hasil Pemilu". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu/>. Diakses tanggal 10 Maret 2021.

Marbun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, 1997.

Mashabi, Sania. "100 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Kandas di MK". <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/09240181/100-perkara-sengketa-pilkada-2020-kandas-di-mk>. Diakses tanggal 10 Maret 2021.

Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, (Desember 2010), h. 27-28.